

DIALEKTIKA RUANG DAN PROSES PRODUKSI SOSIAL

(Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik di Makassar)

*DIALECTICAL SPACE AND SOCIAL PRODUCTION PROCESS
(Sociological Studies of Ethnic Residential Pattern at Makassar)*

AHMADIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

**DIALEKTIKA RUANG DAN PROSES PRODUKSI SOSIAL
(Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik di Makassar)**

*DIALECTICAL SPACE AND SOCIAL PRODUCTION PROCESS
(Sociological Studies of Ethnic Residential Pattern at Makassar)*

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi Ilmu Sosial
(Konsentrasi Sosiologi)

Disusun dan Diajukan oleh

A h m a d i n

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

Pengesahan Ujian Promosi

**DIALEKTIKA RUANG DAN PROSES
PRODUKSI SOSIAL**

(Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik di Makassar)

Diajukan Oleh:

**AHMADIN
P0604306006**

*Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dipertahankan
di depan panitia ujian Promosi Doktor*

Menyetujui
Tim Promotor



Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D
Promotor

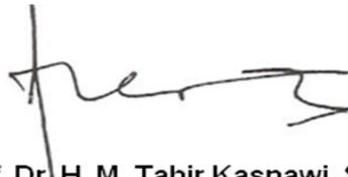


Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman, MS Ko-promotor



Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina, N.K. M.A
Ko-promotor

Ketua Program Studi
Ilmu Sosial



Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU

PRAKATA

Tiada kata yang paling pantas selain ungkapan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya dalam berbagai bentuk. Tanpa itu semua, disertasi yang berjudul “Dialektika Ruang dan Proses Produksi Sosial: Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik di Makassar” ini dapat diselesaikan.

Rampungnya hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah seperti ini, sesungguhnya bukan merupakan prestasi tunggal diri saya, akan tetapi akumulasi dari sejumlah arahan, bimbingan, petunjuk, dorongan, fasilitas, perhatian, tenaga, dan lain-lain yang diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat dan kata “tabe”, izinkan saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D, selaku promotor saya, Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman, MS dan Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina NK, MA, masing-masing selaku ko-promotor saya. Merekalah sumber “mata air ilmu” itu, yang telah membasahi gersang dan tandusnya wilayah pengetahuan saya lewat bimbingan, arahan, dan curahan waktu sejak awal hingga akhir penulisan disertasi ini. Merekalah yang telah “menggarami cairan” pengetahuan ilmu sosial ini sehingga memiliki rasa yang “beraroma” Sosiologi.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU, Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA, Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA., dan Prof. Dr. H. Abdul Salam, M.Si, masing-masing sebagai penguji. Aneka kritikan, saran, dan bantuan yang

diberikan, menjadi kontribusi ilmiah terhadap proses “penyempurnaan” karya ilmiah ini.

3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A Paturusi, rektor Universitas Hasanuddin dan Prof. Dr. Ir. Mursalim, direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA, sebagai dekan Fisip Universitas Hasanuddin atas segala bantuan, kemudahan, dan fasilitas selama studi hingga penyelesaian disertasi.
5. Bapak Prof. Dr. Arismunadar, M.Pd, sebagai rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Drs. Amiruddin, M.Pd, sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial UNM, atas izin yang diberikan untuk melanjutkan studi Strata Tiga (S3) di Unhas.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid (almarhum), Prof. Dr. H.M. Idris Arief, MS, Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D., Prof. Dr. H.M. Idrus Abustam, Prof. Dr. Hj. Farida Nurlan, MA, Prof. Dr. Hj. Rabihatun Idris, MS, Prof. Dr. Darmawan Mas’ud Rahman, M.Sc (almarhum), dan lain-lain sebagai pengajar Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan sebagian ilmu yang dimilikinya kepada saya.
7. Teman-teman dosen Jurusan Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNM.
8. Ayahanda Muhammad Umar (almarhum), Ibunda Yuliana, atas restu dan bantuan merekalah, sehingga saya dapat melanjutkan studi di Program Doktor Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

9. Istriku tercinta Misbawati, SE, M.Si dan anakku Rayhan Arqam Hidayatullah, sudah terlampau banyak waktu dan biaya yang semestinya menjadi hak mereka, saya gunakan untuk kuliah, dengan penuh tawakkal kepada Allah S.W.T, mereka bersabar dan tabah selama saya menempuh pendidikan.

Kemudian ucapan terima kasih pula kepada segenap pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu dan telah berjasa memberikan bantuan kepada saya. Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

Makassar, Desember 2011

Ahmadin

ABSTRAK

AHMADIN. *Dialektika Ruang Dan Proses Produksi Sosial: Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik di Makassar* (dibimbing oleh T.R. Andi Lolo, Darmawan Salman, dan Dwia Aries Tina)

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) kekuatan dominatif yang merombak ikatan sosial dan struktur spasial berbasis etnik di kota Makassar, (2) dampak sosial yang ditimbulkan, dan (3) pola bertahan serta upaya penemuan ruang-ruang sosial baru yang dilakukan oleh anggota kelompok etnik.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan unit analisis Kampung Melayu, Kampung Wajo, Kampung Maluku, Kampung Cina, dan beberapa perkampungan etnik lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan sistem snowball, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena rombaknya ikatan sosial dan struktur spasial berbasis etnik disebabkan oleh tata ruang dan pembangunan kota, perkawinan campuran, tuntutan profesi dan dunia kerja, tekanan kapitalisme, gaya hidup, dan kebijakan sektor perumahan. Terjadinya pemaknaan atas ruang yang memengaruhi tumbuhnya pusat pemukiman baru, perubahan fungsi ruang dari domestik ke komersial sehingga berdampak pada praktek pengomoditan ruang. Akibatnya, lahirlah lokalitas-lokalitas buatan dalam wujud kompleks perumahan dengan alat perekat sosial yang kurang jelas. Ketidakmampuan para anggota etnik tertentu untuk hidup mengelompok dalam spasial yang sama, akibat tekanan kapitalisme dan derasnya arus konsumerisme, pada gilirannya melahirkan kecenderungan untuk menemukan ruang-ruang sosial baru. Ruang-ruang inilah yang disebut visi baru tentang realitas sekaligus perspektif ekologi baru. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pemaknaan terhadap ruang oleh individu yang menentukan tindakannya, untuk bertahan atau melakukan mobilitas dan berupaya menemukan ruang sosial serta spasial baru pula. Singkatnya, kebutuhan, perasaan, tujuan, *self image*, cita-cita masa depan, dan sebagainya sangat menentukan pilihan tindakan seseorang dalam memilih tempat pemukiman.

ABSTRACT

AHMADIN. *DIALECTICAL SPACE AND SOCIAL PRODUCTION PROCESS: Sociological Studies of Ethnic Residential Pattern at Makassar* (Supervised by TR Andi Lolo, Darmawan Salman, and Dwia Aries Tina)

This study aims to analyze: (1) the dominative force that has revolutionized the social bond and ethnic-based spatial structures in Makassar city (2) the resulted social impacts, and (3) the survival pattern and efforts to find new social space conducted by the ethnic group members.

The research location was Makassar city, and the analysis units were Melayu Village, Wajo Village, Maluku Village, China Village, and some other ethnic villages. The data were obtained through observations, depth interviews with snowball system, and documentation.

The results reveal that the phenomenon of the change in social bond and ethnic-based spatial structure is caused by the master plan and city development, inter-ethnic marriages, professional and work demands, capitalist pressure, lifestyle, and the policy in settlement sector. Regarding the understanding of space which influences the growth of new settlement center, it related to the change of space function from domestic to commercial function. As a result, what can be seen is space commodification practice. This result in the emergence of artificial localities in the form of neighbourhood with unclear social glue. The inability of certain ethnic members to live in group in the same space due to the capitalist pressure, and the rapid flow of consumerism, results in the tendency to find new social space. These space are called new vision about reality, as well as new ecology perspective. Based on this result, it is found that it is individual understanding of space that determines his action, whether to survive, or do mobility and try to find social space and new space. In short, the necessity, feeling, purpose, self image, future expectation, and other things really influence someone's choice of action in choosing a place to live in.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan masalah	12
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II. DESKRIPSI LOKASI DAN LATAR PENELITIAN	16
A. Makassar: Konsepsi dan Sejarahnya	16
B. Fakta Geografis dan Demografis	22
C. Sistem Sosial Budaya	37
D. Aglomerasi Perkampungan: Cikal Bakal Kota Makassar	42
BAB III. KAJIAN TEORI	51
A. Sosiologi Sejarah	51
B. Ekologi Sosial	55
C. Struktur Spasial dan Anatomi Kota	59
D. Peta Sosial dan Struktur Masyarakat Kota	61
E. Diferensiasi Sosial	68
F. Konsep Ruang (Spasial) dan Waktu	69
G. Tiga Desain Konstruksi	77
H. Interaksionisme Simbolik	77
I. Konsep Dialektika	82
J. Paradigma Sosiologi Yang Digunakan	83
K. Penelitian Relevan	83

L. Kerangka Konseptual	87
M. Definisi Operasional	90
BAB IV. METODE PENELITIAN	92
A. Tahapan Penelitian	92
B. Lokasi Penelitian	92
C. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian	93
D. Penentuan Informan	95
E. Teknik Pengumpulan Data	96
F. Teknik Analisis Data	97
BAB V. HASIL PENELITIAN	100
A. Deskripsi Pola Pemukiman Berbasis Etnik	100
1. Sejarah Kehadiran Etnik di Makassar	101
2. Perkampungan Berbasis Etnik	128
B. Perubahan Pola Pemukiman dan Proses Produksi Sosial	195
1. Perubahan Pola Pemukiman	195
2. Makna Ruang dan Tumbuhnya Pusat Pemukiman Baru	227
C. Pola Bertahan dan Penemuan Ruang-Ruang Sosial Baru	258
1. Terbentuknya Paguyuban-Paguyuban	260
2. Lokalisasi (sektor informal)	267
3. Pengadaan Tanah Kapling Bersama Kerabat	274
4. Pemakaman Berbasis Etnik	276
D. Analisis Fakta Sosial dan Definisi Sosial Tentang Titik Temu antara Kutub Makna Ruang dan Produksi Sosial	282
BAB VI. PENUTUP	292
A. Kesimpulan	292
B. Saran	294
DAFTAR PUSTAKA	296
LAMPIRAN	311

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Penduduk Kota Madya Ujung Pandang 1980 dan 1990	27
2. Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Tiap Km ² Menurut Kecamatan di Kota Makassar, Tahun 2009	32
3. Penduduk menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Makassar, Tahun 2009	36
4. Jumlah Penduduk Cina di Makassar Hingga Masa Pendudukan Jepang	182

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)	312
2.	Risalah Serahterima Penegasan Tapal Batas antara Kotamadya Ujung Pandang dengan Kabupaten Gowa	314
3.	Tata Cara Perluasan Wilayah Kotamadya Makassar	316
4.	Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971	317
5.	Surat Keputusan Gubernur No. 369/KI/71 Tanggal 17 November 1971 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971	319
7.	Penjanjian Bongaya	324
8.	Peta Sulawesi	329
9.	Peta Sulawesi Selatan	330
10.	Maps: Dutch Plans I, 1790; Local Practice, 1840	331
11.	Maps: Dutch Plans II, 1790; Local Practice, 1840	332
12.	Peta Jalan Kota Makassar	333
13.	Peta Kota Makassar	334
14.	Riwayat Hidup Penulis	335

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengkaji mengenai bentuk maupun dinamika suatu kota dengan kompleksitas persoalan yang ada padanya, secara fundamental melibatkan sejumlah variabel penyerta yang saling terkait secara korelatif. Demikian pula sistem sosial, struktur spasial, serta kondisi ekologis senantiasa mengalami perubahan seiring dengan gerak dinamika kota dari waktu ke waktu. Kesalingterkaitan dan kesatupaduan tak terceraiikan antara dinamika kota dan perubahan tersebut, menggiring kita mengamini pandangan bahwa kota sesungguhnya bukanlah sebuah entitas alamiah melainkan sebuah entitas sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa kota secara sosial terbentuk bukan tanpa intervensi manusia, melainkan sarat dengan dinamika lembaga maupun relasi sosial. Bahkan berbagai ruang dalam kota yang telah diberi dan memiliki makna sedemikian rupa, sesungguhnya dibentuk oleh suatu proses sosial yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Pemikiran seperti ini menurut Pradadimara (2005: 252), ditopang oleh premis yang menganggap bahwa ruang merupakan suatu entitas obyektif (seperti selembar kertas kosong) yang begitu saja ada secara alamiah dan siap untuk diisi oleh apa saja. Bahkan diilhami oleh perspektif Lefebvre (1991), ia mengatakan bahwa pemahaman ruang secara obyektif seperti ini, diistilahkan

alam kedua (*second nature*) dimana kondisi obyektif ruang telah ditransformasikan dan dimaknakan secara sosial dan historis.

Atas dasar pemikiran bahwa ruang bukan sesuatu yang mati dan tidak bergerak, bahkan tidak selamanya tertindas oleh pergerakan sejarah, maka studi ini berangkat dari keinginan untuk menyoal ikhwal ruang (*space*) dan tempat (*place*) dalam kaitannya dengan proses produksi sosial. Selain itu, titik tekan perhatian pada kajian ini merupakan dimensi lain dari teori sosial modern yang sejauh ini lebih tertarik pada persoalan waktu yang dilihat sebagai bidang dinamis dari perubahan sosial. Dengan demikian, kegelisahan serta kerinduan seorang Foucault (Barker, 2005; lihat juga Soja 1995b) akan pentingnya menulis seluruh sejarah ruang, menjadi bagian dari kenyataan terutama dalam khasanah kajian sosiologi sejarah.

Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian ini, secara historis pernah ditata dan dibentuk dengan *setting* kota zaman pertengahan di Eropa oleh rekayasa teknologi ala kolonial Belanda pada abad ke-17. Hasil kajian yang dilakukan oleh Sumalyo (1999) menunjukkan bahwa kehidupan dalam benteng (*intra-muras*) pun menjadi ciri khas kala itu dan menjadi elemen utama yang dominan, sekaligus berfungsi sebagai pertahanan dari serangan sporadis penduduk pribumi.

Menurut Sutherland (dalam Peter J.M. Nas, ed, 1986) elemen kedua tumbuh dan berkembang di sebelah timur laut Fort Rotterdam, oleh Speelman disebut perkampungan pedagang dengan perumahan bagi orang-orang asing

dan pendatang (*Negory Vlaardingen*). Penghuni kawasan ini merupakan campuran dari orang-orang Tionghoa peranakan dan penduduk asli Kristen. Selain itu, terdapat juga perkampungan orang-orang Wajo di sebelah Timur Vlaardingen (Koro, 2006: 220) dan sebelah utara kampung Wajo ini terdapat tempat pemukiman orang-orang Cina yang disebut Kampung Cina (Asba, 2007: 68) atau Pecinan yang dalam bahasa Makassar disebut *Paccinang* (Koro, 2006: 220).

Elemen ketiga yang ikut membentuk struktur dan tata ruang pemukiman dalam pusat wilayah Makassar adalah Kampung Melayu, yakni pemukiman penduduk asli yang bersifat kohesif di Utara *Vlaardingen*. Penamaan ini didasarkan oleh asal usul penghuninya yakni orang-orang Melayu yang diusir dari Makassar karena mudah diperalat oleh Belanda bersama dengan orang Bugis. Elemen keempat yakni kawasan pemukiman di sebelah Selatan Fort Rotterdam yang dikenal sebagai Kampung Baru. Daerah ini dihuni oleh orang-orang pribumi dari Asia serta budak yang telah dibebaskan, yang bekerjasama dengan Belanda dan menjadi Kristen dikenal dengan istilah *Mardijkers* (Sutherland dalam Peter J.M. Nas, ed, 1986: 41; Poelinggomang, 2002: 36-37). Nama ini kemudian disesuaikan dengan pengucapan penduduk setempat, yakni *Maradekaya* sebagaimana penyebutan yang dikenal hingga sekarang (Lihat Mattulada, 1982: 74).

Selain itu, di kota Makassar juga terdapat perkampungan lain seperti Kampung Lette dan Loji yang terletak di pinggir pantai (sebelah Barat Jalan Nuri sekarang). Penamaan Lette didasarkan atas kecenderungan

penghuninya yang hanya tinggal sementara, sedangkan Kampung Lojia didasarkan atas adanya Benteng Lojia masa VOC dulu. Sementara itu, di Jalan Mangkura (sekarang bernama jalan La Galigo dan Jalan La Sirrang) pernah terdapat pemukiman orang Banjar yang pada masa VOC bernama Kampung Mangkura. Bahkan masih banyak lagi pusat permukiman lainnya termasuk Kampung Maluku di Jalan Datu Munseng, pemukiman orang Buton di sekitar Pasar Butung, dan sebagainya (Koro, 2006: 214, 216, 221).

Karakteristik kota yang ditata dengan arsitektur kolonial ala zaman pertengahan di Eropa pada beberapa kota bekas kekuasaan Belanda di Indonesia termasuk Makassar, mengingatkan kita pada formulasi dan tipe kota menurut Weber. Menurutnya, satu elemen yang muncul dari berbagai batasan mengenai kota adalah adanya kumpulan tempat tinggal yang terpisah namun dalam satu pemukiman yang tertutup. Dalam ruang tertutup inilah tercampur aspek kekuasaan bersenjata (militeristik) sebuah kota, sebagaimana anggapan bahwa kota sejatinya adalah juga benteng (Pradadimara, 2005: 252).

Dominasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Makassar selama beberapa waktu lamanya, harus diakui telah memproduksi suatu tatanan kehidupan sosial, pola pemukiman, dan situasi ekologi khas ala Eropa. Diferensiasi dan bahkan segragasi dengan berbagai ukurannya, pun tampak memetakan secara sosial masing-masing kelompok berlatar etnik di kota ini. Serentak dengan itu, kepentingan dan kekuasaan menjadi motif

kebijakan sehingga pemetaan yang cenderung separatif-polaritatif ini lebih bersifat politik.

Dialektika ruang dengan proses produksi sosial seperti ini, dalam perspektif Gottdiener (1994: 195-201; Pradadimara, 2005: 254) dianggap sebagai *the social production of urban space*, yang memiliki 4 (empat) karakteristik. *Pertama*, relasi spasial maupun temporal (historis) merupakan aspek yang intrinsik dalam masyarakat. Hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lain dari masa ke masa merupakan bagian integral dari suatu masyarakat. *Kedua*, fenomena geografis dan demografis merupakan cerminan dari proses tarik menarik dari relasi sosial. *Ketiga*, meski bisa dianggap bahwa ada hubungan antara bentuk dan status bagian/ruang kota dengan moda-moda produksi dalam sistem ekonomi yang kapitalistik yang mewarnai kota, namun hubungan tersebut tidak otomatis ataupun statis. *Keempat*, proses produksi ruang kota tidak hanya merupakan proses perubahan struktur ruang tetapi juga melibatkan peran aktor-aktor yang memiliki pilihan untuk mengikuti struktur yang berubah tersebut atau bahkan ikut mengubah struktur.

Pusat-pusat pemukiman di kota Makassar yang telah dipetakan secara sosial demi kepentingan politik pada masa pemerintahan kolonial Belanda dahulu, tampaknya masih membekas hingga kini. Hal ini tercermin melalui beberapa pusat pemukiman seperti: Kompleks Pecinan, Kampung Melayu, Kampung Wajo, Kampung Maluku, dan sebagainya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa pusat pemukiman tersebut lantas menjadi

suatu penghalang bagi upaya persebaran etnik ke seluruh wilayah kota Makassar.

Gerak dinamis pembangunan kota Makassar dari masa ke masa, dapat dipastikan membawa pengaruh terhadap struktur dan tata ruang pemukiman penduduk. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh faktor peningkatan jumlah penduduk, modernisasi kota, dan geografis. Sekadar digambarkan bahwa sebuah ensiklopedia terbitan 1922 menyebutkan penduduk Makassar pada 1916 berjumlah lebih kurang 39.000 jiwa. Komposisi penduduk tersebut masing-masing adalah: golongan Cina sebanyak 6.900 jiwa, Eropa 1.500 jiwa, Timur Jauh 300 jiwa, dan pribumi sisanya (lebih kurang 30.300 jiwa, penduduk) (Paeni, dkk., 1984/1985: 63).

Melalui sumber yang sama juga dijelaskan tentang laporan J.W. de Klein, bahwa pada 1947 penduduk Makassar lebih kurang 165.000 jiwa, masing-masing penduduk Cina sebanyak 32.000 jiwa dan Eropa 5.000 jiwa. Dalam perkembangan selanjutnya, penduduk Makassar pada 1954 berjumlah lebih kurang 200.000 jiwa. Bahkan kalkulasi pertumbuhan penduduk juga dibandingkan antara 1916 dengan 1947, dengan selisih selama 31 tahun sekitar 126.000 jiwa. Akhirnya, dikemukakan bahwa dalam setiap satu tahun rata pertambahan penduduk sekitar 4.000 jiwa atau sekitar 3 persen. Dengan demikian, tercatat hingga 1950, penduduk Makassar berjumlah sekitar 200.000 jiwa.

Kondisi penduduk kota Makassar pada dekade 1980-an hingga paroh pertama era 1990-an, juga mengalami perubahan yang sangat drastis.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980, jumlah penduduknya adalah 708.465 jiwa dengan rincian 357.304 jiwa penduduk laki-laki dan 351.161 jiwa penduduk wanita. Sepuluh tahun kemudian yakni 1990, jumlah penduduk mengalami peningkatan mencapai 944.372 jiwa, masing-masing penduduk laki-laki sebanyak 473.048 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 471.324 jiwa (Koestoers, 1995: 66).

Peningkatan jumlah penduduk baik karena faktor urbanisasi maupun kelahiran tersebut, pada gilirannya mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang tata ruang kota. Serentak dengan itu, pengelompokan warga masyarakat bisa jadi bukan lagi berdasarkan etnik seperti masa kolonial, melainkan lebih cenderung ke arah pertimbangan status sosial (ekonomi) dan kepentingan tertentu. Karena itu, dinamika kota Makassar dengan sederet perubahan yang ditimbulkan, di satu sisi telah merubah struktur sosial serta "menghancurkan" perekat keetnisan dan semangat etnosentrisme pada masing-masing suku bangsa. Di sisi lain beberapa kelompok etnik di kota ini, justru berusaha mempertahankan keberadaan kelompoknya.

Keberadaan kelompok etnik di kota Makassar dewasa ini, sangat menarik untuk dipetakan kembali sekaligus mengetahui motif dan pola persebarannya secara historis. Bahkan lebih jauh akan memetakan tentang keberadaan penduduk asli Makassar, apakah berkembang dan menyesuaikan bersama dinamika pembangunan yang senantiasa berubah atau sebaliknya berada pada posisi yang termarginalkan. Perubahan struktur pemukiman oleh

dialektika ruang dan proses sosial ini, pada gilirannya memunculkan beberapa problema sosial pokok sekaligus menjadi inti kajian dalam penelitian ini.

Pertama, perkembangan kota Makassar dalam berbagai aspek dan multi dimensi di bawah "tekanan" dominatif serta konstruksi kapitalisme modern dalam wajah pembangunan, secara sosial menyebabkan terjadinya perubahan struktur sekaligus indikator pengelompokan yang berbeda sebelumnya. Jika masa kolonial pengelompokan etnik didasarkan atas kepentingan politik, masa pascaproklamasi kemerdekaan oleh dorongan semangat etnosentrisme dan kedekatan emosional sesama suku, maka modernisasi kota yang sepaket dengan kapitalisme rupanya telah merombak tatanan dan memutuskan ikatan (perekat sosial) berlabel etnik tersebut. Syarat pengelompokan pun lalu berubah berdasarkan parameter ekonomi, yang pada gilirannya membentuk pusat-pusat pemukiman baru dengan alat perekat sosial yang kurang jelas.

Kedua, pengambilalihan oleh pihak pemerintah untuk merumuskan dan meletakkan konsep dasar program perumahan di Indonesia, pun memiliki andil yang cukup besar terhadap polarisasi sosial serta pembentukan kelompok baru. Ketentuan ini tercermin melalui Keputusan Presiden RI No. 29/1974 tentang pembentukan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas). Badan ini ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan perumahan dan pembangunan kota, terutama untuk melayani penduduk yang berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Kemudian Keputusan Presiden RI No. 34/1974 tentang pembentukan Badan

Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN), yang bertugas merumuskan kebijakan perumahan nasional. Hal ini juga didukung oleh Keputusan Menteri Keuangan No. B/MK/N/1/1974 tentang penugasan kepada Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyelenggarakan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi perumahan yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta.

Sejarah panjang Makassar hingga menjadi sebuah kota modern yang wajahnya telah dikonstruksi berdasarkan kepentingan kaum kapitalis tersebut, berdampak pada perubahan ruang sosial dan spasial bahkan diferensiasi yang sangat mencolok. Ikatan etnik secara spasial pun semakin menunjukkan ketidakjelasan dan persebarannya juga dipastikan mengikuti kepentingan yang cenderung ke pertimbangan ekonomi. Demikian pula pengambilalihan peran oleh pemerintah untuk menetapkan dan merealisasikan kebijakan perumahan bekerjasama perusahaan swasta, pada gilirannya membentuk kelompok baru yang cenderung eksklusif-diskriminatif. Akhirnya, kelompok yang tercipta melalui kompleks perumahan tak lebih hanya sekadar sekumpulan individu yang dekat secara fisik namun ikatan sosialnya renggang. Karena itu, membutuhkan waktu relatif lama untuk mengidentifikasi diri masing-masing kemudian menjadi sebuah komunitas.

Realitas seperti inilah yang digambarkan oleh Brunsvick dan Danzin (2005) sebagai perubahan peradaban yang diistilahkan sebuah metamorphosis sejati dalam hubungan antar manusia. Dalam kondisi demikian, menurut Sutrisno (2005) peradaban menjadi runtuh ditandai oleh kegagalan kebudayaan memunculkan kreativitas dalam menghadapi

tantangan zaman. Puncak keruntuhan terjadi bila ada disintegrasi peradaban dimana kesatuan sosial pecah.

Pembangunan bersama gagasan modernisasi dan pembentukan tata ruang kota Makassar oleh konstruksi kapitalisme yang eksploitatif, tidak hanya mengaburkan dan memutuskan ikatan kelompok sosial berdasarkan etnik. Sebaliknya, ketidakmampuan mengikuti arus evolusi modernitas dengan modal ekonomi sebagai prasyarat, pada gilirannya semakin menggeser dan bahkan menggusur secara marginal etnik tertentu termasuk penduduk asli. Konsekuensinya, peminggiran etnisitas ini akan melahirkan mobilitas sosial serta pola perpindahan pemukiman penduduk ke pinggir kota lalu ke pinggiran lainnya, dan seterusnya. Pola perpindahan (pemindahan) penduduk ke pinggiran kota tanpa proses balik seperti ini, identik dengan istilah "loncatan katak". Teori loncatan katak (*leap frog theory*) ini pernah digunakan oleh Sutomo (1995) tatkala melukiskan tipologi sirkulasi terkait perpindahan penduduk di Kota Wonosobo dan Cilacap.

Aneka variabel yang mengiringi proses perubahan tata ruang dan ekologi sosial di Kota Makassar, secara sosiologis sangat menarik untuk dielaborasi terutama untuk membandingkan secara sinkronik peta sosial sekarang dan masa lampau. Bahkan upaya menemukan alat perekat sosial baru oleh masing-masing etnik yang telah terpisah secara spasial (ekologis) dewasa ini, pun tidak kalah penting untuk dikaji. Hal ini terutama jika berpijak pada beberapa realitas empiris dewasa ini, bahwa ketidakmampuan para anggota dari etnik tertentu membentuk kelompok tersendiri pada gilirannya

menyebabkan mereka berusaha menemukan mekanisme integrasi untuk menyatukan diri.

Kenyataan seperti ini tampak pada pengadaan kegiatan arisan keluarga dan pembentukan organisasi kerukunan keluarga. Hal ini dianggap sebagai alat pemersatu dan pendukung untuk terus merekatkan ikatan kekeluargaan mereka. Selain itu, pengadaan beberapa kompleks pemakaman (pekuburan) oleh para anggota etnik tertentu, sesungguhnya dapat dimaknai sebagai sebuah mekanisme dan model integrasi yang berbasiskan ikatan etnik. Singkatnya, bahwa ketidakberdayaan mereka melawan perubahan dengan sejumlah prasyarat yang dibutuhkan, pada gilirannya mendorong mereka untuk menemukan ruang-ruang sosial baru.

Bukan tidak mungkin kecenderungan ini adalah sebuah perspektif ekologi baru untuk merespon perubahan dan pergeseran dari konsepsi mekanistik ke konsepsi tentang realitas yang holistik sebagaimana yang diungkap oleh Capra (2007). Bahkan menurutnya, perspektif ini tidak ditemukan dalam pandangan dunia Cartesian, sehingga yang kita perlukan adalah sebuah paradigma dan visi baru tentang realitas.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Mengkaji tentang perubahan ruang sosial dan spasial dalam konteks tata pemukiman penduduk di kota Makassar secara historis-sosiologis, tidak dapat dipisahkan dengan dinamika kota dan kebijakan politik penguasa. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tata ruang kota disusun menyerupai arsitektur gaya Eropa. Demikian pula orientasi dan pola pikir serta

kepentingan politik pemerintah kolonial mewarnai kebijakan mengenai tata ruang kota. Perkembangan kota Makassar di bawah "tekanan" serta konstruksi ekonomi, secara sosial menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemukiman sekaligus indikator pengelompokan penduduk. Bahkan modernisasi kota yang sepaket dengan kapitalisme lebih jauh telah merombak tatanan dan memutuskan ikatan (perekat sosial) berlabel etnik.

Konsekuensinya, syarat pengelompokan pun lalu berubah berdasarkan parameter ekonomi, sekaligus membentuk pusat-pusat pemukiman baru dengan alat perekat sosial yang kurang jelas. Efek progresif dinamika kota dengan segala perubahan yang ditimbulkan termasuk ruang-ruang sosial, pada gilirannya melahirkan bentuk-bentuk diferensiasi dan segregasi spasial. Meskipun demikian, di sisi lain upaya mempertahankan kerapuhan ikatan etnik menjadi salah satu kecenderungan sebagian dari mereka. Karena itu, permasalahan pokok dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Mengapa perkembangan jumlah penduduk, modernisasi kota, dan geografi menjadi faktor dominan bagi perubahan pola pemukiman berbasis etnik di Kota Makassar?
2. Mengapa organisasi-organisasi kerukunan keluarga yang bersifat kedaerahan menjadi media alternatif untuk memelihara ikatan-ikatan sosial walaupun masyarakat etnik tinggal bersebaran?.

Permasalahan pertama bermaksud menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pola pemukiman penduduk di

Makassar. Perkembangan jumlah penduduk kota pada gilirannya membawa konsekuensi spasial (ruang) pemukiman, yang mendorong pemerintah merubah Tata Ruang (*Master Plan*) pembangunan kota serta kebijakan sektor perumahan. Selain itu, modernisasi kota bersama tekanan kapitalisme global berdampak pada perubahan gaya hidup, profesi dan dunia kerja baru yang berpengaruh pada pilihan tempat tinggal. Sedangkan faktor geografis berhubungan dengan perubahan makna ruang diiringi tumbuhnya pusat-pusat pemukiman baru. Bahkan mengungkap bentuk-bentuk diferensiasi dan segregasi spasial.

Pertanyaan kedua, menyorot tentang pola bertahan dan upaya penemuan ruang-ruang sosial baru yang dibentuk atau diciptakan oleh anggota kelompok etnik sebagai wujud eksistensi dan resistensi. Ruang sosial baru yang dimaksud antara lain: pembentukan paguyuban-paguyuban berbasis etnik, lokalisasi (sektor informal), pengadaan tanah kapling bersama kerabat, dan pemakaman berbasis etnik.

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka ruang lingkup kajian ini secara tematik dibatasi pada telaah tentang perubahan makna ruang diiringi perubahan pola pemukiman serta dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, menganalisis keberadaan serta prospek organisasi daerah sebagai media alternatif memelihara ikatan-ikatan sosial. Secara spasial, kajian ini dibatasi pada pemukiman etnik seperti: Kampung Melayu, Kampung Cina, Kampung Wajo, Kampung Maluku, Kampung Bara-baraya, dan Kampung Rama. Secara temporal, kajian ini dimulai sejak 1960-an dengan

pertimbangan era ini merupakan fase awal ekspansi wilayah Kota Makassar. Adapun gambaran masa sebelumnya dimaksudkan sebagai rangkaian proses sosial yang harus dilihat sebagai bagian integral tak terceraiakan dengan fenomena kehidupan perkotaan kekinian.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekuatan dominatif yang telah merombak ikatan sosial dan struktur spasial berbasis etnik di Kota Makassar serta dampak sosial yang ditimbulkan.
2. Untuk menganalisis pola bertahan dan jenis upaya penemuan ruang-ruang sosial baru oleh anggota kelompok etnik di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. *Pertama*, secara akademik penelitian ini merupakan pengembangan kajian sosiologi dengan fokus kajian menyangkut perubahan ruang-ruang sosial dan spasial yang menggunakan pendekatan ilmu sejarah. Karena itu, penggunaan teori interaksionisme simbolik untuk menggambarkan pemaknaan ruang-ruang tersebut akan memberi arah baru bagi pengembangan teori ini terutama untuk menjelaskan secara analitik bagaimana ruang-ruang sosial dan spasial berubah. *Kedua*, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pemerintah mengenai pentingnya memelihara identitas

dan hubungan etnik serta pentingnya ruang-ruang sosial alternatif untuk mengakomodir urusan/kepentingan seetnik.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI DAN LATAR PENELITIAN

A. Makassar: Konsepsi dan Sejarahnya

Mengurai dinamika kota Makassar secara historis, rasanya tidak lengkap jika tidak dibarengi oleh deskripsi mengenai konsep tentang Makassar, kondisi geografis, demografis, sosio-politik, dan sebagainya yang sepaket dengan perkembangannya. Untuk itu, pertama-tama akan dibahas mengenai Makassar: konsepsi dan sejarahnya yang dimaksudkan untuk pemahaman tentang definisi Makassar yang akan dijadikan sebagai unit analisis dari penelitian ini.

1. Beberapa Pengertian

Menyebut atau mendengar istilah Makassar, maka beragam persepsi dan multimakna akan hinggap dalam benak kita. Artinya bahwa kata atau istilah Makassar akan bersinggungan dengan arti yang majemuk berdasarkan konteksnya, yakni dalam kategori apa ia hendak dibicarakan atau dibahas?. Hal ini penting karena Makassar dapat dimaknai sebagai nama dari salah satu suku bangsa dan bahasa, nama kota di kawasan timur Indonesia (baik kota pelabuhan maupun kota perdagangan), nama Selat, bandar niaga, dan bahkan ada yang mengaitkannya sebagai nama Kerajaan.

Bila merujuk pada konsepsi dan pengertian Makassar versi Mattulada (1982: 14-20), maka akan diperoleh beberapa makna sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Makassar sebagai nama suku bangsa dan bahasa (group etnik), yakni. suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Sulawesi. Daerah-daerah yang dihuni oleh suku bangsa Makassar di Sulawesi Selatan ini meliputi: Gowa, Maros, Galesong, Takalar, Topejawa, Cikoang, Laikang, Jeneponto dan Bangkala. Daerah-daerah ini umumnya menggunakan bahasa Makassar dalam pelaksanaan berbagai aktifitas kesehariannya. Bahasa Makassar memiliki aksara yang dikenal sebagai aksara atau huruf Lontaraq yang diciptakan (diperkenalkan) oleh Daeng Pamatte, syahbandar pertama kerajaan atas perintah dari Karaeng Tumapa'risi' Kallonna.
- b. Makassar sebagai sebutan atas kerajaan Gowa-Tallo, yakni di antara orang-orang Makassar (dalam arti etnik) yang mendiami negeri-negeri yang disebutkan di atas, maka terdapat pula orang Makassar yang mendiami negeri-negeri sepanjang pesisir muara Sungai Jeneberang dan Tallo. Negeri tersebut disebut dalam lontaraq dan sebagian di antaranya masih ada hingga kini, antara lain: Tombolo, Lakiung, Saumata, Parang-parang, Data', Agang Je'ne, Bisei, dan Kalling.
- c. Makassar sebagai ibukota kerajaan, yakni dalam kepustakaan dunia Barat (Eropa) terutama bangsa Belanda Kerajaan Gowa-Tallo (kerajaan kembar atau bersaudara) biasa disebut sebagai Kerajaan Makassar.

Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Somba Opu dengan pelabuhan niaga internasionalnya yang bernama Makassar.

Sekadar digambarkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-6 Tunatangka' lopi, membagi dua kerajaannya. Kepada puteranya yang bernama Batara Gowa diserahkan daerah-daerah Gallarang Kerajaan Gowa, antara lain: Gallarang Pacellekang, Gallarang Pattallasang, Gallarang Bontomanai (sebelah timur), Gallarang Bontomansi (sebelah barat), Gallarang Tombolo, dan Gallarang Mangasa. Daerah-daerah Gallarang inilah yang kemudian dinamakan Kerajaan Gowa di bawah Raja Gowa ke-7 yang bernama Batara Gowa. Selanjutnya kepada puteranya yang bernama Karaeng Loe ri Sero, diserahkan daerah-daerah Gallarang Kerajaan Gowa, antara lain: Gallarang Saumata, Gallarang Panampu, Gallarang Moncongloe, dan Gallarang Parangloe. Daerah-daerah ini kemudian dinamakan kerajaan Tallo (Mattulada, 1982: 17-18).

Selain itu, istilah Makassar juga digunakan untuk menyebut (penamaan) selat di antara gugusan pulau yang tersebar di Indonesia. Selat Makassar sebagaimana diketahui bersama, terletak antara daratan Sulawesi Selatan (Pulau Sulawesi) dan Pulau Kalimantan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Makassar "dipatenkan" menjadi nama ibukota provinsi Sulawesi Selatan (meskipun juga pernah menggunakan istilah Ujung Pandang).

2. Lintasan Sejarah Makassar

Awal kota dan bandar Makassar berada di muara sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo awalnya berada dibawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Akan tetapi pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang. Setelah kedua kerajaan ini berkerjasama mereka melakukan penyerangan dan menaklukan kerajaan-kerajaan sekitarnya (Waskito, 2009: 19).

Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga Bandar niaga Tallo dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar.

Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI yakni Sultan Hasanuddin didirikan pula Benteng Rotterdam di bagian Utara. Ketika itu pemerintahan kerajaan masih dibawah kekuasaan kerajaan Gowa. Pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional serta sektor politik dan sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa ini merupakan puncak kejayaan kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan kerajaan Gowa pada keruntuhan (Sewang, 2005: 21).

Sumber lain menjelaskan bahwa kota Makassar mulai dibangun oleh Raja Gowa ke-9 Karaeng Tumaparisi Kallonna pada permulaan abad ke-16. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511, maka kota ini mulai ramai dikunjungi oleh para pedagang seperti: dari India, Cina, Semenanjung Malaka, dan dari kepulauan Nusantara lainnya. Makassar sebagai kota pelabuhan dan niaga bertambah ramai setelah Malaka direbut Belanda 1641, sehingga Portugis membina hubungan baik dengan Makassar (Mangemba, 1972: 1).

Kedudukan penting Makassar, juga dikemukakan oleh F.W. Stapel bahwa Kota Makassar termasuk tempat-tempat penting di Kepulauan Nusantara pada permulaan abad ke-17 sebagai pasar rempah-rempah yang ramai (yang berasal dari Maluku). Bahkan menurut penulis buku "Geschiedenis van Nederlansch Indie" ini bahwa orang-orang Portugis yang mempunyai kantor perwakilan dagang (*Factorij*) di kota ini, mengangkut rempah-rempah ke India dan Eropa (Mangemba, 1972: 2).

Melalui sumber yang sama juga dijelaskan tentang peran penting Makassar yang dikemukakan dalam laporan tahunan P. Masinio (Misionaris Katolik Portugis asal Ternate) 1607-1608. Bahkan ia menyatakan bahwa beberapa bantuan dan surat-surat yang dikirim dari Malaka pada 1607 melalui sebuah kapal kecil telah dirampas oleh Belanda di Makassar. Selain itu, Winkler Prins pun mengamini pernyataan ini lewat lembaran-lembaran ensiklopesinya, yang menyatakan bahwa Kota Makassar adalah pusat pusat

perdagangan rempah-rempah yang penting di kepulauan Nusantara sebelah Timur sejak abad ke-16.

Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah di Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan Saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting Saudagar Melayu dalam perdagangannya yang berdasarkan pertukaran surplus pertanian dengan barang-barang impor itu.

Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil disekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris pula. Maka Makassar meningkatkan produksi komoditinya itu. Bahkan, dalam menyerang kerajaan-kerajaan kecil lainnya, para ningrat Makassar bukan hanya menguasai kawasan pertanian lawan-tawannya itu. Akan tetapi berusaha pula untuk membujuk dan memaksa para saudagar setempat agar berpindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru itu.

Tidak hanya itu, Tome Pires lewat "Suma Oriental"-nya yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Armando Contesao (1944), melukiskan tentang keluasan pelayaran Makassar pada permulaan abad ke-16. Tome Pires telah mempelajari periran Indonesia dengan kapal Portugis dan ia menemukan orang-orang Makassar dan Bugis sebagai perampok yang ulung dan pedagang-pedagang yang cekatan dengan kapal-kapalnya yang besar dan bagus (Mangemba, 1972: 4).

Sampai pada pertengahan pertama abad ke-17, Makassar berupaya memperluas daerah kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara. Selain itu kerajaan Gowa juga mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam.

Sultan Hasanuddin menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah. Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah independen di Sulawesi dan Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing.

B. Fakta Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Keadaan geografi Makassar yang dijadikan batasan wilayah penelitian ini merupakan wilayah Kota Makassar yang pernah dikenal dengan nama Kotamadya Ujung Pandang atau wilayah Makassar. Sebaliknya, bukan sebagai pemukiman suku bangsa Makassar yakni wilayah administrasi masa pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915-1916 yang disebut bagian pemerintahan Makassar (Afdeeling Makassar). Wilayah administrasi

pemerintahan ini sekarang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) serta Kabupaten Takalar. Afdeeling Makassar yang terletak pada bagian selatan dari jazirah selatan pulau Sulawesi, terletak antara $118^{\circ}30'$ hingga 121° - Bujur Timur dan antara 0° - 55° hingga 7° - Lintang Selatan (Palallo, 2008).

Batas wilayah Afdeeling Makassar ini, di bagian Timur dengan Afdeeling Bonthain (sekarang Kabupaten Bonthain, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai). Di bagian Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Di bagian Utara berbatasan dengan Onder Afdeeling Soppeng (sekarang Kabupaten Soppeng) dan Onderadeeling Barru (sekarang Kabupaten Barru). Di bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Afdeeling Makassar termasuk daerah yang beriklim tropis dan mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim penghujan berlangsung antara bulan September hingga bulan April dan musim kemarau dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Waktu musim hujan lebih lama dari waktu kemarau menyebabkan kehidupan pertanian berkembang pesat. Hal ini juga dimungkinkan oleh keadaan fisik alamnya yang banyak terdapat dataran rendah yang subur yang dialiri oleh sungai-sungai antara lain Sungai Jeneberang, Sungai Kelara, Sungai Maros, Sungai Datara, Sungai Pare, Sungai Allu, Sungai Tamanroya dan Sungai Ponto.

Di samping tanah datar, ke arah pedalaman akan dijumpai daerah berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Daerah pegunungan itu dikenal

dengan sebutan daerah Pegunungan Lompobattang, yang membentang dari Selatan ke Utara, dengan puncak-puncak yang tertinggi di bagian paling Selatan Gunung Lompobattang dengan ketinggian 2871 meter dan ke arah Utara berbatasan antara bekas Kerajaan Gowa dan Bonthain dijumpai puncak tertinggi Gunung Bawakaraeng dengan ketinggian 3042 meter (Palallo, 2008).

Selain itu terdapat pula beberapa puncak pada daerah Pegunungan Lompobattang yang cukup tinggi seperti Gunung Porong, Gunung Lokka, Gunung Kadingloe, Gunung Sirukang, Gunung Patiro, Gunung Limbawa, Gunung Moncong Loe, Gunung Lewang, Gunung Lemo, Gunung Bululawa, Gunung Dampo, Gunung Posso. Ke arah baratnya dijumpai Gunung Aru-aru, Gunung Timpurung, Gunung Dammar, Gunung Bontomanae, Gunung Balombong, Gunung Pangkalaeng Toppa. Daerah yang ditumbuhi hutan dan belantara itu mempunyai arti dan manfaat tersendiri bagi penduduk. Di samping sebagai pencegah banjir dan erosi, serta mencari kayu bakar, hutan-hutan di daerah pegunungan itu juga menyediakan hasil hutan seperti rotan, damar dan berbagai jenis kayu (Palallo, 2008).

Mengenai Makassar, menurut Pelras (1983: 60) maka salah seorang bangsa Belanda, Manuel Pinto yang pernah mengunjungi Makassar pada permulaan abad ke-17 memberikan kesaksian berikut:

... Daerah Makassar dari laut sebagai daerah yang paling subur dan yang paling menyenangkan. Daerah itu berupa daratan, indah dan hijau tidak begitu tertutup hutan seperti daerah-daerah lain di Hindia; penduduknyapun sangat padat. Makassar adalah daerah persawahan yang indah di mana-mana padi tumbuh; hal itu dapat dilihat jika berlayar menyusuri pantai, terutama dalam bulan Maret, April, Mei dan

Juni. Pada bulan-bulan itu padi belum dituai. ...Lebih ke dalam lagi, terdapat perkebunan kelapa yang indah. Pohon-pohonnya ditanam berjejer dengan teratur dan daunnya yang rindang itu melindungi orang-orang dari teriknya matahari ...”, selanjutnya dikatakan, bahwa negara ini betul-betul sangat indah dan subur, menghasilkan segala macam bahan pangan dan beras pun berlimpahan... ”

Gambaran itu menunjukkan bahwa Makassar tidak hanya memiliki wilayah pantai yang baik sehingga mendorong penduduknya turun ke laut, tetapi juga memiliki wilayah daratan yang memungkinkannya bertani. Kegiatan pertanian sangat berkembang berkat adanya sejumlah sungai yang mendukungnya untuk pengembangan irigasi, seperti Sungai Tallo yang bermuara di bagian utara dan Sungai Jeneberang yang bermuara di bagian selatan kota Makassar, juga terdapat sejumlah aliran sungai lainnya, seperti: Sungai Sanrobone dan Kacia (Poelinggomang, 1991).

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah Utara ke wilayah Selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur Timur dan 5,8 derajat lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut (BPS, 2009).

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah Barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian Utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di Selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah

kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km² (BPS, 2009).

Dewasa ini jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 buah dan memiliki 143 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Kota Makassar berbatasan dengan: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Pangkep; (2) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Maros; (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa, dan (4) Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Selat Makassar (BPS, 2009).

Secara administratif, wilayah kecamatan yang terluas di Kota Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya (48,22 km² atau 27,43 persen dari wilayah Kota Makassar). Sementara itu, wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Wajo (1,99 km² atau 1,13 persen dari wilayah Kota Makassar). Sementara itu, Kecamatan Wajo merupakan kawasan pusat bisnis (*central business*) utama di Kota Makassar, di samping zona *central business* lainnya, yaitu kawasan Panakkukang Mas, kawasan Metro Tanjung Bunga dan kawasan *central business* Daya.

Tabel 1. Luas wilayah-wilayah kecamatan dan persentasenya terhadap luas wilayah Kota Makassar.

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
1.	Mariso	1,82	1,04
2.	Mamajang	2,25	1,24
3.	Tamalate	20,21	11,50

4.	Rappocini	9,23	5,25
5.	Makassar	2,52	1,43
6.	Ujung Pandang	2,63	1,50
7.	Wajo	1,99	1,13
8.	Bontoala	2,10	1,19
9.	Ujung Tanah	5,94	3,38
10.	Tallo	5,83	3,32
11.	Panakkukang	17,05	9,70
12.	Manggala	24,14	13,73
13.	Biringkanaya	48,22	27,44
14.	Tamalanrea	31,84	18,11
Jumlah		175,77	100,00

Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional (dikutip dari: Pemkot Makassar, 2009).

Kondisi tata guna lahan Kota Makassar secara umum terdiri atas; permukiman dan bangunan lainnya (perkantoran, perumahan dan permukiman, pendidikan, jasa, fasilitas sosial), sawah tadah hujan, dan lahan yang tidak diusahakan atau lahan kosong. Pergesaran pemanfaatan lahan kawasan Kota Makassar secara umum telah mengalami perubahan yang cukup drastis, akibat terjadinya peningkatan pembangunan aktifitas sosial ekonomi.

Dari gambaran mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain.

2. Keadaan Penduduk

a. Pertumbuhan

Gambaran kondisi penduduk Makassar secara historis, dimaksudkan sebagai bahan pembandingan dalam upaya menemukenali betapa kota ini telah menjadi pusat berbagai aktivitas di masa lampau. Dengan demikian, jika kemudian ia tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota yang maju, maka tentu saja merupakan bagian integral dari proses atau tahapan masa sebelumnya.

Mengenai kondisi penduduk di Makassar, dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Dalam hanya seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang dan dengan ini termasuk ke-20 kota terbesar dunia Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, kota terbesar musuh utamanya, Belanda, baru mencapai sekitar 60.000 orang yang bersifat kosmopolitan dan multikultural. Perkembangan bandar Makasar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka, ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511, demikian di Jawa Utara semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan kerajaan Mataram (Waskito, 2005: 23).

Sumber lain menjelaskan bahwa keadaan demografi berdasarkan hasil sensus penduduk yang pernah dilaksanakan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1930, menunjukkan bahwa penduduk yang mendiami jazirah selatan yang kini menjadi Propinsi Sulawesi Selatan hanyalah sekitar 2.657.000 jiwa. Tahun 1961, penduduk daerah itu berjumlah 4.517.000 jiwa dan tahun 1980 meningkat menjadi 6.054.000 jiwa (Sensus Penduduk, 1981, Abustam 1980).

Menurut keterangan Harvey (1989), jumlah penduduk Afdeeling Makassar sebanyak 672.365 orang pada 1930. Penduduk di daerah ini terdiri dari berbagai etnis, kelompok etnis terbanyak adalah Etnis Makassar yang jumlahnya sebanyak 487.012 orang. Mereka mendiami bagian terluas dari daerah itu, meliputi Jeneponto, Takalar, Gowa dan Kotapraja Makassar (Ujungpandang) dan sebagian Maros dan Pangkep.

Kelompok etnis terbanyak lainnya adalah etnis Bugis berjumlah 142.718 orang. Mereka mendiami bagian terbesar dari daerah Pangkep, Maros, dan Kotapraja Makassar. Sedangkan kelompok etnis lainnya, merupakan pendatang di daerah itu seperti orang-orang Eropa, Cina, Timur Asing lainnya, Mandar, Toraja, Timur, Jawa dan Madura serta Sunda. Kelompok etnik lainnya itu pada umumnya berkonsentrasi di Kotapraja Makassar.

Sumber lain menjelaskan betapa sulitnya melacak data tentang penduduk kota Makassar 1900-1950, hal ini disebabkan karena saat itu belum ada sensus penduduk (sebagaimana sekarang). Meskipun demikian, sebuah ensiklopedia terbitan 1922 menyebutkan penduduk Makassar pada 1916 berjumlah lebih kurang 39.000 jiwa. Komposisi penduduk tersebut masing-masing adalah: golongan Cina sebanyak 6.900 jiwa, Eropa 1.500 jiwa, Timur Jauh 300 jiwa, dan pribumi sisanya (lebih kurang 30.300 jiwa, penduduk) (Paeni, dkk., 1984/1985: 63).

Melalui sumber yang sama juga dijelaskan tentang laporan J.W. de Klein, bahwa pada 1947 penduduk Makassar lebih kurang 165.000 jiwa, masing-masing penduduk Cina sebanyak 32.000 jiwa dan Eropa 5.000 jiwa.

Dalam perkembangan selanjutnya, penduduk Makassar pada 1954 berjumlah lebih kurang 200.000 jiwa. Bahkan kalkulasi pertumbuhan penduduk juga dibandingkan antara 1916 dengan 1947, dengan selisih selama 31 tahun sekitar 126.000 jiwa. Akhirnya, dikemukakan bahwa dalam setiap satu tahun rata pertambahan penduduk sekitar 4.000 jiwa atau sekitar 3 persen. Dengan demikian, tercatat hingga 1950, penduduk Makassar berjumlah sekitar 200.000 jiwa.

Menurut Paeni, dkk (1984/1985), pertumbuhan penduduk Makassar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran, tetapi juga dipicu oleh faktor urbanisasi oleh para pencari kerja. Setelah 1930-an, selain pencari kerja beberapa pendatang tampak dipengaruhi oleh keinginan melanjutkan pendidikan. Selain itu, para pendatang dari berbagai daerah di luar Sulawesi Selatan, di antaranya ada dari bekas romusha yang didatangkan dan ditinggalkan oleh Jepang. Dalam laporan J.W. de Klein, digambarkan tentang jumlah romusha, sebagai berikut:

.... pada waktu NICA datang ke Makassar, dijumpai di sini sekitar 8.000 orang romusha yang sakit, kotor, dan setengah kelaparan yang terdiri dari orang-orang Jawa, Madura, Batak, Minangkabau, dan beberapa orang Aceh. Selain itu, pada sekitar tahun 1946/1947 orang-orang Timor pencari kerja berdatangan lagi di Makassar. Sebagian di antara mereka itu ada yang tidak kembali lagi ke daerah asalnya, menetap di Makassar. Jadi satu hal yang wajar kalau pada tahun 1954 penduduknya sudah mencapai 200.000 jiwa.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Makassar selama beberapa tahun lamanya, disebabkan oleh beberapa faktor (selain urbanisasi dari pedalaman Sulsel). Dengan kata lain, kondisi penduduk

juga masih merupakan warisan kebijakan kaum kolonial serta posisi Makassar sebagai tempat yang layak untuk dikunjungi dengan berbagai keperluan.

Kondisi penduduk kota Makassar pada dekade 1980-an hingga paroh pertama era 1990-an, mengalami perubahan yang sangat drastis. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980, jumlah penduduknya adalah 708.465 jiwa dengan rincian 357.304 jiwa penduduk laki-laki dan 351.161 jiwa penduduk wanita. Sepuluh tahun kemudian yakni 1990, jumlah penduduk mengalami peningkatan mencapai 944.372 jiwa, masing-masing penduduk laki-laki sebanyak 473.048 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 471.324 jiwa (Koestoers, 1995: 66).

Melalui sumber yang sama, juga diuraikan tentang perubahan jumlah penduduk pada beberapa kecamatan di kota Makassar. Beberapa kecamatan tampak mengalami peningkatan jumlah penduduk sejak 1980-1990, seperti: Kecamatan Tamalate, Panakkukang, dan Tallo. Sementara itu, wilayah yang mengalami penurunan, yakni: Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, dan Mamajang. Bahkan kepadatan penduduk kota ini, juga diuraikan yakni dalam kurun waktu 1980-1990 mengalami peningkatan dari 4030 jiwa/km² menjadi 5373 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Madya Ujung Pandang 1980 dan 1990.

Kecamatan	Jumlah Penduduk	
	1980	1990
Makassar	102.973	93.513
Ujung Pandang	44.102	38.192

Bontoala	52.685	55.607
Wajo	68.073	64.560
Mamajang	71.560	67.929
Ujung Tanah	42.514	45.229
Tamalate	99.502	199.650
Tallo	78.193	111.182
Panakukang	86.022	150.758
Biringkanaya	31.655	73.361
Jumlah	708.465	944.372

Sumber: Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang (dalam Raldi H. Koester, 1995: 67).

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa cukup tingginya angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk, selain disebabkan oleh pertumbuhan alami, juga disebabkan oleh migrasi penduduk. Hal ini dipahami mengingat bahwa Makassar sebagai sebuah kota merupakan daerah tujuan bagi para pendatang dari berbagai daerah yang ingin mengadu nasib.

b. Pembagian Kerja Berbasis Etnik

Pembagian kerja dalam masyarakat menurut Durkheim (1964) diistilahkan sebagai *division of labor* dan Hugo (1965) menamakannya *block occupation*. Pembagian kerja ini sangat bervariasi motif dan alasannya serta sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat bersangkutan. Maksudnya, diferensiasi sosial berdasarkan jenis pekerjaan biasanya terkait dengan profesionalisme, keterampilan, kemampuan (dari segi modal), dan indikator lainnya termasuk polarisasi sosial warisan kebijakan penguasa masa lalu.

Kecenderungan menekuni suatu jenis pekerjaan itu, pada gilirannya menjadi penciri kelompok tertentu (termasuk etnik) dan terwarisi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, alasan historis biasanya mempengaruhi pilihan

profesi seseorang di kelak kemudian hari dengan menyandarkan alasan bahwa ia memilih jenis pekerjaan tertentu karena pendahulu mereka juga berprofesi sama.

Kecenderungan mencap secara labeling etnik tertentu sebagai penggiat (penekun) suatu pekerjaan dan bahkan dijadikan sebagai penciri sosio-kultural, tidak jarang dipolakan secara mitologis. Hal ini tercermin sebagaimana ungkapan yang pernah populer di jagat Bugis-Makassar, berikut ini: "*Ri werenggi pole ri dewata-e, alebbireng koi ri luwu, asogireng koi ri wajo, awaraniang koi ri bone, awatangeng koi ri gowa*". Pernyataan tersebut, berarti: "dianegurahkan oleh dewata, kemuliaan pada Luwu, kekayaan pada Wajo, keberanian pada Bone, dan kekuatan pada Gowa (Rahman, 1999: 85-86; lihat juga Ahmadin, 2006, 2009b).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa seolah posisi sosial seseorang telah terpolariasi secara diferensiasif oleh kehendak sang pencipta. Dengan demikian, jenis profesi tertentu akan dilakoni oleh seseorang berdasarkan titian takdir. Bahkan tidak jarang pula keberhasilan atau pun kegagalan seseorang dalam menjalankan usaha atau menekuni pekerjaan tertentu, pun disandarkan (dihubungkan) dengan dimensi mitologis ini. Sebut saja seseorang gagal dalam menjalankan suatu jenis usaha, akan dianggap bahwa memang leluhurnya tidak berprofesi seperti itu dan sebaliknya.

Kecenderungan menekuni profesi tertentu bagi masing-masing etnik tersebutlah yang menyebabkan terjadinya *block occupation* berbasis etnik terutama pada daerah perkotaan yang masyarakatnya majemuk. Kota

Makassar yang penduduknya plural dari segi latar etnik, menunjukkan karakter seperti ini, sehingga wajar jika ada semacam pembagian kerja berdasarkan etnik sekaligus penciri dan identitas sosial.

Catatan sejarah menunjukkan adanya keragaman suku bangsa, yang mendiami Makassar sejak beberapa abad silam. Suku bangsa yang dimaksud masing-masing berasal dari Banjar, Minahasa, Sangir, Ambon (orang Maluku), Timor, Madura, Tanimbar, Buton, Cina, India, dan Arab. Selain itu, perantau lokal masing-masing berasal dari Mandar, Toraja, dan orang-orang Massenreng Pulu. Alasan perpindahan suku-suku bangsa di atas menurut Walinono (1974: 83), pada dasarnya bervariasi dan pendorong yang terkuat adalah alasan ekonomi di samping karena adat-istiadat dan faktor pendidikan.

c. Kondisi Penduduk Dewasa Ini

Setelah mengurai tentang kondisi penduduk Kota Makassar beberapa tahun silam, sebagai bahan perbandingan maka perlu digambarkan kondisi dewasa ini paling tidak empat tahun terakhir. Sekadar digambarkan bahwa penduduk Kota Makassar tahun 2007 tercatat sebanyak 1.235.239 jiwa yang terdiri dari 618.233 laki-laki dan 617.006 perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin Kota Makassar yaitu sekitar 100,20 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 100 penduduk laki-laki (lihat BPS Kota Makassar, 2008).

Penyebaran penduduk Kota Makassar yang dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk terkonsentrasi di wilayah

Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 150.014 jiwa atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk. Kemudian disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 140.822 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sendiri, sebanyak 132.479 jiwa (10,72 persen) dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang yakni sebanyak 28.206 jiwa (2,28 persen) (BPS Kota Makassar, 2008).

Tabel 3. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar, tahun 2007

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)
1.	Mariso	53.825	1,82	29,574
2.	Mamajang	59.533	2,25	26,459
3.	Tamalate	150.014	20,21	7,423
4.	Rappocini	140.822	9,23	15.257
5.	Makassar	81.645	2,52	32,399
6.	Ujung Pandang	28.206	2,63	10,725
7.	Wajo	34.504	1,99	17,339
8.	Bontoala	60.850	2,10	28.976
9.	Ujung Tanah	47.723	5,94	8.034
10.	Tallo	133.426	5,83	22,886
11.	Panakkukang	132.479	17,05	7.770
12.	Manggala	97.556	24,14	4.041
13.	Biringkanaya	126.839	48,22	2.630
14.	Tamalanrea	87.817	31,84	2.758
Jumlah/ rata-rata		1.235.239	175,77	7,028

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional (dikutip dari: Pemkot Makassar, 2009)

Data tahun 2005 dan 2007 menunjukkan laju tingkat pertumbuhan penduduk Kota Makassar rata-rata selama tujuh tahun terakhir (2001 s.d 2007) sebesar 1,32 persen per tahun. Data yang diperoleh menunjukkan pola penyebaran penduduk di Kota Makassar secara umum terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat pertumbuhan kota.

Ditinjau dari kepadatan penduduk per km persegi pada tahun 2007, Kecamatan Makassar adalah kecamatan yang terpadat yaitu 32.399 jiwa per km², disusul kecamatan Mariso (29.574 jiwa per km²), Kecamatan Bontoala (28.976 jiwa per km²). Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sekitar 2.630 jiwa per km persegi, kemudian Kecamatan Tamalanrea 2.758 jiwa per km², Kecamatan Manggala (4.041 jiwa per km²),

Kecamatan Ujung Tanah (8.034 jiwa per km²), kecamatan Panakkukang (7.770 jiwa per km²). Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di tiga kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala.

C. Sistem Sosial-Budaya

Untuk mengetahui tentang sistem pelapisan sosial pada masyarakat Makassar pada abad XVII maka dapat ditelusuri dalam berbagai karya dari sejarawan seperti Abdul Razak Patunru (1993), Abu Hamid (2005), Mattulada

(1998), Ahmad Sewang (2005). Para sejarawan dari tanah Sulawesi Selatan ini, nampaknya memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat Makassar dibagi dalam tiga tingkatan yaitu lapisan masyarakat *Ana Karaeng* (keturunan raja dan kaum bangsawan), lapisan masyarakat *Tau Maradeka* (orang merdeka) dan lapisan masyarakat *Ata'* (budak/hamba sahaya). Berikut penjelasan mengenai tiga lapisan dalam masyarakat Kerajaan Kembar ini:

Pertama, lapisan *Anak Karaeng* adalah golongan yang menempati posisi tertinggi dalam pelapisan masyarakat Gowa. Mattulada (1998: 37) menyatakan bahwa lapisan ini merupakan keturunan raja (Tu-Manurung) dan mereka yang menempati posisi ini biasanya bergelar *Karaengta*. Keistimewaan orang yang berada dalam golongan ini selain bisa mendapatkan banyak kenyamanan dalam kehidupan kesehariannya juga dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat Gowa. Jabatan yang dimaksudkan seperti *Tu-Nisomba* (Raja) dan menteri-menteri kerajaan serta jabatan-jabatan besar lainnya.

Pelapisan *Anak Karaeng* ini sendiri terbagi atas empat golongan, yaitu: golongan *Anak Tikno*, *Anaksipuwe* (anak separuh), *Anak cerak* dan *Anak Karaeng-Sala*. Golongan *Anak Tikno* adalah bangsawan murni yang berasal dari keturunan To-Manurung atau yang diistilahkan Patunru sebagai anak raja yang murni atau yang masak darahnya. Kedua orang tuanya sama-sama berdarah bangsawan, baik yang berasal dari kalangan Kerajaan Gowa sendiri maupun dari kerajaan lain yang dianggap setaraf dengan Kerajaan Gowa, yang jelasnya merupakan keturuna To-Manurung.

Anak Tikno ini terbagi atas dua lagi yakni *Anak Pattola* (Anak yang berhak penuh menggantikan kedudukan raja dalam kerajaan sebagai Sombaya atau yang biasa dikenal sebagai putra mahkota) dan *Anak Manrapik* merupakan anak raja lainnya yang berhak juga menjadi pejabat tinggi kerajaan apabila Anak Pattola tidak bersedia menduduki jabatan tinggi kerajaan atau karena anak Pattola dianggap kurang cerdas, tidak mampu atau tidak waras (Sewang, 2005: 32). Tingkatan kedua dari golongan Anak Karaeng adalah Anak Sipue (bangsawan separuh) yang merupakan Anak Karaeng yang lahir dari perkawinan antara anak keturunan bangsawan (To-Manurung) dengan manusia biasa atau masyarakat bukan dari lapisan bangsawan, dan oleh karena adanya percampuran ini makanya orang yang ada dalam tingkatan ini biasa disebut anak bangsawan separuh. Lapisan inipun terbagi atas dua yakni *Anak Sipue Manrapik* dan *Anak Sipuwe*.

Tingkatan ketiga dari lapisan Anak Karaeng adalah *Anak Cerak* merupakan golongan yang sudah memiliki darah campuran yang berasal dari seorang ayah berdarah bangsawan Anak Tikno Pattola, Anak Manrapik, ataupun Anak Sipue Manrapik dan Anak Sipue, sedangkan ibunya berasal dari golongan Ata (budak). Dengan keadaannya yang demikian, maka orang yang ada dalam lapisan ini biasa dikatakan sebagai anak karaeng yang hampir luntur kebangsawanannya, namun orang tersebut tetap menyanggah status sebagai anak bangsawan yang jelas-jelas menempati posisi atas dalam pelapisan masyarakat Gowa. Tingkatan keempat dari lapisan anak karaeng adalah *Karaeng Sala* yakni merupakan sebutan bagi anak karaeng

yang ayahnya berasal dari golongan *Anak Sipue* atau *Anak Cerak* sedangkan ibunya berasal dari golongan Tomaradeka ataupun Ata (budak).

Pada umumnya dari golongan "*ana karaeng*" yang telah diuraikan di atas, golongan anak cera dan golongan anak karaeng sala inilah yang terbanyak dan terbesar jumlahnya. Hal ini disebabkan hampir semua raja atau anak raja, disamping satu atau dua orang permaisurinya (istri yang sederajat). Bahkan sering pula raja atau anak raja yang tidak memiliki atau belum mempunyai permaisuri, tetapi sudah lebih dahulu mempunyai selir-selir yang bahkan tidak sedikit jumlahnya. Antara Selir-selir itu sering terjadi persaingan, saling iri dan sebagainya untuk menjadi wanita kesayangan. Didalam hal ini sering ditempuh segala macam jalan dan cara untuk mencapai tujuannya. Bahkan jikalau perlu dengan menyingkirkan saingannya. Maka tidak heran jikalau didalam istana sering terjadi perhelatan antara istri-istri raja dan keluarga atau kelompok pengikut-pengikutnya. Hal inilah yang sering menimbulkan kerumitan dalam soal pergantian raja, sehingga ketika raja yang memerintah wafat atau turun tahta sering terjadi pertikaian yang kadang berakhir dengan perang saudara antara anak-anak raja yang berambisi.

Kedua, lapisan Tomaradeka (orang merdeka) terbagi pula menjadi yaitu: Golongan *Tubajik* atau *Tobajik* (Orang baik-baik) dan golongan Tusamarak atau Tosamarak (Orang kebanyakan). Golongan *Tubajik* (Tu=orang; baji=baik), Jadi tubaji artinya orang baik-baik. Golongan ini terdiri atas orang-orang merdeka atau rakyat yang termasuk golongan orang baik-baik. Mereka ini biasanya memakai gelar "*daeng*" dibelakang namanya.

Orang-orang Tubajik ini biasa juga disebut *tau* atau *tu rua arena* yang berarti orang yang dua namanya, karena mereka biasanya memakai dua nama, yakni nama diri yang diberikan oleh orang tua dan nama *Paddaengang*. Kalau menurut Sewang golongan ini adalah keluarga yang masih dapat menunjukkan satu silsilah keturunannya yang berhubungan dengan salah-satu lapisan anak karaeng. Namun ia sendiri sudah tidak dapat menunjukkan identitasnya, pada lapisan mana sebenarnya ia berada, karena sudah sangat jauh keluar dari lapisan anak karaeng. Sedangkan lapisan *Tusamarak* artinya orang kebanyakan atau orang biasa yang jumlahnya mayoritas dalam masyarakat Gowa. Mereka yang ada dalam golongan ini masih termasuk golongan orang-orang merdeka, bukan budak ataupun hamba sahaya (Patunru, 1993:134; Sewang, 2005:34; Hamid, 2005:30).

Ketiga, Lapisan *Ata* yang terbagi pula dalam tiga tingkatan yaitu: Golongan *Ata Sossorang* (budak pusaka turun-temurun), *Ata Nibuang* yaitu orang yang dijadikan *Ata* karena dibuang oleh lingkungan keluarganya dan *Ata Tumangirang* (Abdi yang disebabkan karena tidak mampu membayar utang) Orang ini juga disebut *Tumangempoang* atau Hamba yang digadaikan. Lapisan *Ata* (hamba) sudah membaur menjadi orang kebanyakan semenjak terhapusnya pemerintahan raja-raja dan terutama setelah memasuki era kemerdekaan. Pelapisan sosial orang Makassar pada umumnya dapat dilihat sekarang dari beberapa kriteria, yaitu Derajat dan dasar keturunan masa lalu, kekuasaan dan peranannya dalam masyarakat, tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan dan kedudukan dan kemampuan ekonomi.

D. Aglomerasi Perkampungan: Cikal Bakal Kota Makassar

Sebelum Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, daerah ini terdiri atas pemukiman penduduk yang terpisah secara aglomeratif. Setiap kampung menunjukkan ciri dan karakternya masing-masing baik menyangkut sistem sosial maupun tata kehidupan yang disesuaikan dengan adat etniknya. Dapat dipastikan bahwa mekanisme pemilihan kepala kampung pun memiliki aturan tersendiri, sebagaimana aturan-aturan lain yang mengatur peri kehidupan anggota komunitasnya. Dengan demikian, tampaklah perkampungan-perkampungan berbasis etnik tersebut ibarat negeri-negeri kecil yang otonom dengan sistem pemerintahan dan aturan tersendiri. Sebut saja antara lain yang sangat terkenal yakni Kampung Wajo (sering disebut Negeri Wajo) yang dikepalai oleh seorang Matoa, menjalankan pemerintahan, adat, dan hukum perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di daerah asal Kerajaan Wajo (ibukotanya, Tosora).

Meskipun penelitian hanya memfokuskan kajian pada empat pemukiman etnik (Kampung Melayu, Wajo, Cina, dan Maluku), namun penting kiranya mengulas secara singkat gambaran tentang masing-masing kampung yang pernah (masih ada hingga kini) di Makassar. Uraian tentang perkampungan di kota ini, akan dibagi berdasarkan distrik masing-masing.

Sekadar digambarkan bahwa sebelum 1921, wilayah Makassar terbagi atas enam distrik masing-masing: Distrik Makassar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah, dan Mariso. Empat distrik pertama tersebut, diperintah oleh seorang kepala bergelar “kapitein” (Kapitang atau Kapiten, bahasa Bugis-

Makassar), sedangkan dua distrik lainnya dikepalai oleh seorang “Gallarang”. Sementara itu, komunitas orang Cina dikepalai oleh seorang pejabat disebut *Major Cina* yang dibantu oleh beberapa kepala kampung atau *Wijkmeesters* (ANRI, 1947).

1. Distrik Makassar

Distrik yang diperintah oleh seorang kepala bergelar “kapitein” ini, membawahi beberapa perkampungan. Adapun sejarah penamaan, penghuni, dan batas-batas wilayahnya, diuraikan sebagai berikut:

a. Kampung Maricaya

Merujuk pada cerita rakyat yang berkembang menunjukkan bahwa konon penamaan kampung ini diambil dari kata salah satu jenis rempah-rempah yakni merica (bahasa setempat dinamakan *marica*). Menurut Burhanuddin, istilah maricaya merupakan refleksi atau gambaran dari sebuah karakter masyarakat yang keras, tegar, dan konsisten pada prinsip atau keyakinan (Wawancara, 11 Maret 2009).

Penamaan Maricaya juga disebutkan bermakna keras, konsekuen, dan sportif dalam menghadapi sesuatu. Malah dikaitkan dengan peran Bandar Makassar sebagai salah satu perniagaan rempah-rempah pada masa kebesaran kemaharajaan Gowa. Wilayah kampung ini terletak pada kedua sisi Maradekaya-weg (Jalan Rusa, sekarang) bagian selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Maradekaya dan di sebelah timur dengan SS-weg. Sementara itu, di sebelah selatan berbatasan dengan Dadi-weg (Jalan Lanto Daeng Pasewang, sekarang). Penduduk yang bermukim di

perkampungan ini terdiri atas orang-orang Makassar asli dan bukan pendatang (Paeni, dkk, 1984/1985: 13).

b. Kampung Maradekaya

Maradekaya dalam bahasa Makassar, berarti merdeka (bebas dari tekanan atau ikatan, pen). Penggunaan istilah ini tentu saja berlaku umum untuk semua jenis kondisi termasuk yang menggambarkan ketiadaan aturan (biasanya bersifat memaksa) yang mengikat. Dengan demikian, suatu wilayah yang diberi nama maradekaya merupakan refleksi bahwa penghuninya adalah orang-orang yang merdeka dari tekanan (bandingkan dengan istilah “Maradekaya” dalam penamaan beberapa kampung di wilayah Susel lainnya).

Menurut Paeni, dkk (1984/1985), kampung ini terkenal sebagai tempat pertemuan dan tempat tinggal para pendekar yang tidak mau kompromi dengan penjajah. Bahkan para buronan juga banyak yang melarikan diri ke kampung ini dan diberi perlindungan, sehingga dianggap kampung yang merdeka. Wilayah perkampungan ini di sebelah utara berbatasan dengan *Schijfberg-weg* (Jalan Sungai Saddang, sekarang), di sebelah barat dibatasi oleh *Maradekaya-weg* (Jalan Gunung Latimojong, sekarang). Di sebelah selatan wilayahnya berbatasan dengan Kampung Lariangbangi (batasnya sekitar Jalan Salahutu sekarang), dan di sebelah timurnya berbatasan dengan *Zelfbestuur Gowa*, dibatasi oleh *SS-weg*.

Melalui sumber yang sama juga dijelaskan bahwa penduduk yang mendiami perkampungan ini, awalnya hanya terdiri atas orang-orang Makassar asli. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Bugis juga

banyak yang menetap di tempat ini. Bahkan etnik lainnya yang juga tinggal di Maradekaya ini, yakni orang-orang Jawa serta beberapa orang Cina.

Keterangan lain mengungkapkan bahwa Kampung Maradekaya, tidak hanya sebagai tempat pelarian para buronan politik kaum kolonial, akan tetapi beberapa di antaranya ada yang menjadikan tempat ini sebagai tujuan pelarian terutama mereka yang kawin lari dengan berbagai motifnya. Dengan demikian, segera setelah pasangan tertentu lari memasuki wilayah ini, sama artinya mereka terbebas dari ancaman keluarga yang bakal menerapkan budaya siri' (biasanya membunuh karena dianggap dilecehkan). Hal ini tercermin melalui penggalan ungkapan seorang informan, seperti berikut: "...punna antamami tauwa ri anne kamponga, te...namontu, pasti maradekami" (Dg. Tompo, Wawancara, 15 Maret 2010).

Ungkapan tersebut, mengisyaratkan adanya semacam garansi sosial atau jaminan keamanan kepada seseorang jika berada di tempat ini. Dengan demikian, bila perabaan spekuatif dilakukan untuk "melegitimasi" kata atau istilah *maradeka* yang menggambarkan adanya jaminan keamanan terhadap mereka yang melarikan diri, maka harus dihubungkan dengan sebuah prakondisi. Perlu diingat bahwa di tempat ini konon dihuni atau bertempat tinggal para pendekar (*pandekara*, Makassar, pen), karena itu wajar jika jaminan keamanan kepada para "buronan" itu ada. Dengan kata lain, proses pengejaran keluarga yang anaknya dilarikan misalnya, boleh jadi akan berhenti sampai di luar wilayah Maradekaya.

c. Kampung Beru

Sesuai dengan namanya yang bermakna baru, perkampungan ini merupakan pusat pemukiman yang berkembang belakangan. Sebagaimana Kampung Maradekaya, kampung ini tumbuh dan berkembang pascapenguasaan Benteng Ujung Pandang oleh pemerintah kolonial Belanda. Pusat perkampungan terletak di sekitar Jalan Somba Opu (*Stands-weg*), Jalan Pattimura, Jalan Samiun, Jalan Wahab Tarru, Jalan Andi Makkasau, Jalan Bau Massepe, dan Jalan Haji Bora sekarang. Di kampung inilah terletak Benteng Ujung Pandang (*Fort Rotterdam*), serta beberapa kantor pemerintahan yakni Balai Kota dan Kantor Gubernur. Selain itu, terdapat Gereja Emmanuel, Gereja Katedral, dan Sekolah Freter. Bahkan di wilayah inilah terletak *Koeningsplein* atau Lapangan Karebosi (Paeni, dkk, 1984/1985).

Melalui sumber yang sama juga dijelaskan tentang batas wilayah Kampung Beru, yakni di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Balandaya, dibatasi oleh Prince Hendrikpad dan Hogepad (sekarang Jalan Riburane dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di sebelah timur dibatasi oleh jalan Jenderal Sudirman (dulu *Hospital-weg*), di sebelah selatan bagian timur berbatasan dengan Kampung Mangkura dan di sebelah selatan bagian baratnya berbatasan dengan Kampung Maluku dengan batasnya di sekitar Jalan Ranggong dan Jalan Ince Nurdin sekarang. Adapun batasnya di sebelah barat adalah Selat Makassar. Penduduk yang mendiami pemukiman ini adalah beberapa keluarga Belanda (Eropa), para baba (Cina peranakan, orang Pakistan, orang Makassar, Bugis, dan Jawa.

d. Kampung Pisang

Tidak berbeda dengan latar penamaan beberapa kampung lainnya, pemukiman yang terletak di sekitar Jalan Gunung Lompo Banttang (dulu *Friedenburg-weg*) ini, bernama Kampung Pisang karena ia adalah penghasil pisang ternama pada masanya.

Wilayah kampung berpenduduk orang-orang Makassar asli, Selayar, Bugis, dan beberapa keluarga Ince (Melayu) ini, berbatasan dengan Maros-weg (Jalan Gunung Bawakaraeng sekarang) di sebelah selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan *Ladjangiru-we* (Jalan Gunung Merapi), di sebelah selatan dibatasi oleh *Shijfberg-weg* dan di sebelah barat dibatasi oleh selokan Hospital-weg (Jalan Jenderal Sudirman, sekarang) (Paeni, dkk, 1984/1985).

e. Ambonkamp

Perkampungan yang dihuni oleh orang-orang Ambon berprofesi pegawai pemerintahan dan militer ini, terbilang relatif muda dibandingkan dengan Kampung Maradekaya dan Kampung Beru. Pertumbuhan dan perkembangan kampung ini, berawal sejak 1946 yakni masa revolusi kemerdekaan RI.

f. Kampung Lainnya

Beberapa perkampungan lain yang tergabung dalam Distrik Makassar, adalah: Kampung Gotong-royong, Kampung Renggang, Kampung Maluku, Kampung Mangkura, Kampung Lariangbangi, dan Maccini.

2. Distrik Wajo

Pada distrik ini terdapat beberapa perkampungan yang tentu saja memiliki riwayat penamaan dan perjalanan sejarah masing-masing (Baca Paeni, dkk (1984/1985: 20-33). Adapun perkampungan yang dimaksud adalah: Kampung Bontoala, Kampung Wajo, Kampung Melayu, Kampung Pattunuang (Makassar = tempat pembakaran), Kampung Butung, Kampung Maligomang, Kampung Layang, Kampung Macciniayo, Kampung Mampu, Kampung Rompegading (Makassar = Bambu Kuning yang terdampar), Kampung Kecak (Makassar = perkampungan para pembuat kecap), Kampung Arab, Kampung Ende, Kampung Cina, Kampung Cangirak, Kampung Balandaya, Kampung Baraya (Makassar = kandang), Kampung Kawaka (Makassar = kampung yang dikelilingi kawat), Kampung Tompobalang (Makassar = kampung di tepi kali), dan Kampung Gaddong (Makassar = gedung tempat penyimpanan harta kekayaan).

3. Distrik Ujung Tanah

Distrik ini terletak pada wilayah sebelah utara Makassar dan memiliki beberapa perkampungan, yaitu:

a. Kampung Tallo

Sebagian orang beranggapan bahwa Tallo berasal dari kata Talloang, yang bermakna berpaling, memandang, atau melihat ke hutan tanpa halangan. Penamaan ini didasarkan pada persepsi masyarakat bahwa ketika dilakukan pembangunan istana raja dahulu, banyak pohon yang ditebang sehingga mengakibatkan orang dapat mengarahkan pandangannya luas kemana-mana. Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa namanya

berasal dari bahasa Melayu yakni Taklok yang artinya sama dengan takluk (tunduk atau kalah). Namun untuk memudahkannya, maka disederhanakanlah istilahnya menjadi Tallo. Bahkan ada versi lain lagi yang mengatakan bahwa dahulu wilayah ini adalah pelabuhan tempat pertemuan para pedagang telur. Karena itu, mereka yang sering membeli telur di tempat ini menamakannya Tallo (Ahmadin, 2008b).

Saat Tallo masih berstatus sebagai kerajaan, wilayahnya diperintah dan terdiri atas 7 Gallarang yakni; Gallarang Pannampu, Gallarang Rappokalling, Gallarang Rappojawa, Gallarang Kalukubodoa, Gallarang Kalukuang, Gallarang Bira, dan Gallarang Tallo. Belum adanya data akurat mengenai asal usul penamaannya, sehingga berdampak pada lahirnya ragam persepsi mengenai makna Tallo tersebut (Ahmadin, 2008b).

b. Kampung Rappokalling

Sebagaimana alasan penamaan Kampung Pisang karena terkenal sebagai penghasil pisang ternama pada masanya, Kampung Rappokalling pun demikian. Perkampungan ini konon merupakan pusat tumbuhnya sejenis pohon bernama *kalli-kalli* di antara areal persawahan penduduk, sehingga dinamailah Rappokalling.

c. Perkampungan Lainnya

Beberapa perkampungan lain di Distrik Ujung Tanah ini, juga memiliki riwayat penamaan dan sejarah masyarakatnya masing-masing (Baca Paeni, dkk (1984/1985: 33-47). Adapun perkampungan yang dimaksud adalah: Kampung Tabaringan (perkampungan laskar armada laut Kerajaan Gowa-

Tallo), Kampung Panampu, Kampung Kalukuang (Makassar = perkebunan kelapa), Kampung Rappojawa, Kampung Kalukubodoa (Makassar = kelapa pendek), Kampung Lakkang, Kampung Gusung, Kampung Pattingalloang, dan Kampung Cambaya (Makassar = pohon asam).

4. Distrik Mariso

Pada distrik ini terdapat beberapa perkampungan seperti: Kampung Dadi (Makassar = susu, tempat perusahaan susu sapi), Kampung Mamajang, Kampung Parang (Makassar = lapangan luas/padang rumput luas), Kampung Sambungjawa, Kampung Jongaya (Makassar = tempat berburu rusa), Kampung Balangboddong (Makassar = sungai bulat, genangan air/kubangan besar), Kampung Kokolojia (Makassar = kebun Loji), Kampung Kunjungmae, Kampung Mario (Makassar = Menyenangkan atau menggembirakan), Kampung Panambungang (Makassar = timbunan), Kampung Lette, Kampung Mariso, Kampung Mattoanging, Kampung Bayang, dan Kampung Bantomarannu (Makassar = bukit gembira).